



P R O F I L POLISI WANITA PERTAMA

SEBAGAI
KEPALA
POLISI
RESORT
(KAPOLRES)

Kemauan publik dijamin reformasi adalah demokratisasi dengan supremasi hukum sebagai tonggakunya. Dan saat ini sudah mulai dirasakan oleh rakyat. Undang-undang Pemilu yang telah disahkan sudah tidak lagi permasalahan "gender" sehingga ditargetkan dalam pemilihan Anggota Dewan yang duduk dikursi DPR nanti wanita dapat mewakili 30%.

Sejalan dengan kemauan politik tersebut pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri telah "melahirkan" satu kebijaksanaan yakni pemberdayaan Polwan dalam segala fungsi dan jabatan penting diawali dengan pengangkatan jabatan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) seorang Polisi Wanita di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jauh sebelum itu sudah ada jabatan penting pada level bawah

yang dijabat Polwan, antara lain:Kapolsek, Waka Polres, Kasat di Polres dan lain-lain.

Untuk lebih jauh, beberapa waktu yang lalu wartawan **Majalah Rastra Sewakottama (MRS)** melakukan wawancara dengan **Agnes Supraptiningsih, Kapolres wanita pertama "di negeri ini"** dan berikut cuplikan hasil wawancara :

dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani penjara.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Perasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Permohonan Grasi**

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pene-

rimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana;
 - d. Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permo-

honan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.

- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang – Undang ini diselesaikan dalam waktu 2(dua) tahun terhitung sejak Undang – Undang ini berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Undang – Undang Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang – undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disyahkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

Tempat kelahiran dan sekolah.

Saya dilahirkan di sebuah kampung di jalan Kaliurang Yogyakarta, kemudian menyelesaikan sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi di Yogyakarta, tahun 84-85 saya mendaftar SEPA MILSUK SUKWAN, dan ditempatkan di Direktorat Pendidikan Mabes Polri, tahun 1988 bertugas di Direktorat Personil Mabes Polri yang sekarang istilahnya DESUMDAMAN POLRI.

Ada cita-cita jadi Polisi sejak kecil?

Cita-cita menjadi seorang Polwan memang tidak ada namun sewaktu SMP saya punya kakak perempuan yang masuk Kowad. Waktu itu saya senang sekali melihat foto-foto kakak memakai baju tentara, dari situ saya berkeinginan menjadi ABRI. Namun sewaktu mendaftar kesarjanaannya saya dibutuhkan di Polri sehingga menjadi anggota Polwan.

Bagaimana harapan ketika awal jadi Polisi Wanita?

Saya hanya bisa berharap dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sebaik-baiknya.

Bagaimana pandangan terhadap kenyataan pembinaan karir Polri terhadap Polwan selama belum reformasi?

Sebelum reformasi memang jabatan penting yang diemban oleh Polwan memang sangat terbatas, namun setelah reformasi banyak anggota Polwan yang diberi kepercayaan oleh pimpinan Polri untuk duduk pada jabatan strategis misalnya Waka Polres dan Kapolsek.

Pandangan serta komentar terhadap kebijaksanaan Kapolri mendudukkan Polwan sebagai Kapolres.

Tentu saja kebijaksanaan Kapolri ini sebagai wujud dari suatu kepedulian Kapolri kepada anggota Polwan. Selain itu, juga sebagai wujud kepercayaan dan perhatian Kapolri terhadap kemampuan dan pembinaan karir anggota Polwan.

Tanggapan dan kendala yang muncul dalam "mengomando" bawahan (anggota) Polki (Polisi laki-laki) oleh pimpinan seorang Polwan?

Untuk sementara ini yang saya monitor tanggapan dari rekan-rekan maupun anggota saya, sangat "welcome" mereka banyak membantu dalam pelaksanaan tugas, karena saya banyak turun kepada anggota, banyak melakukan komunikasi secara informal, pribadi per pribadi, seringkali ke ruangan mereka, sering gobrol di ruang kerja mereka,

atau dimana saja sehingga dari situ dapat mengetahui perkembangan tugasnya dan tentu saja sekaligus mengetahui permasalahan-permasalahannya yang mereka hadapi. Dengan demikian dirasakan tidak ada kendala, karena saya juga dibantu Waka Polres.

Bagaimana pelaksanaan operasi yang tidak kenal waktu?

Setiap akan melaksanakan operasi tentu saja anggota melaporkan dan saya sering bergabung sehingga bisa monitor kegiatan mereka baik malam maupun siang hari. Di Subang ini saya sendiri, keluarga ada di Jakarta, sehingga tidak ada masalah, kapan saja ada kegiatan bisa ikut bergabung. Dengan kehadiran dalam kegiatan atau operasi dapat meningkatkan motivasi anggota dan sekaligus mengendalikan kegiatan tersebut.

Kendala dalam operasi?

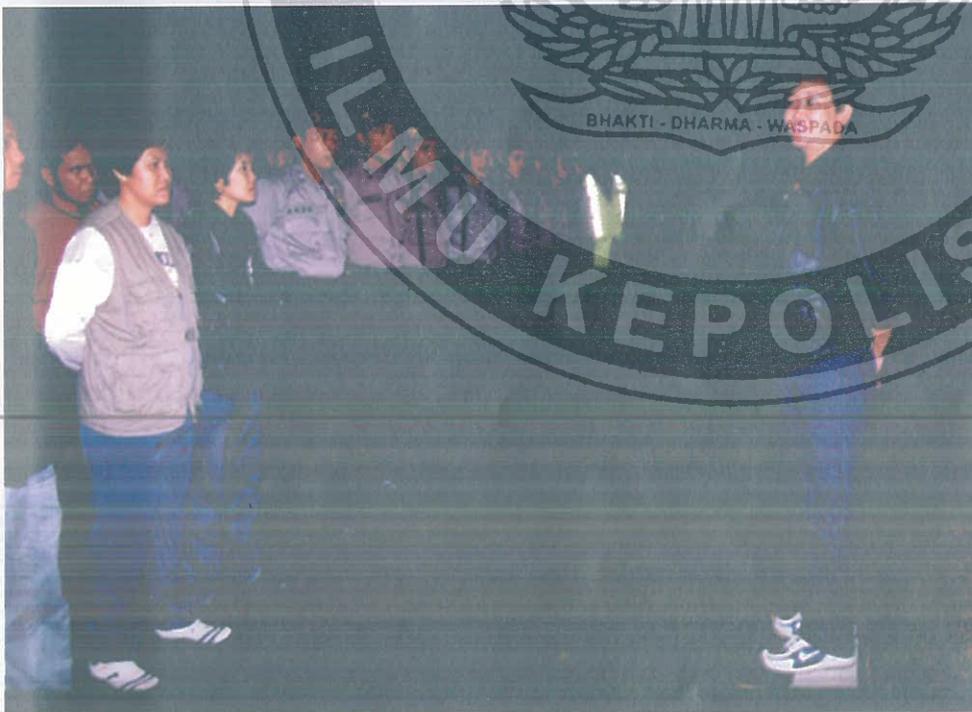
Kendala dalam operasi selama ini belum saya temukan, jadi kalau ada operasi selalu membawa hasil, walaupun kadang-kadang tidak optimal, tidak sesuai yang diharapkan; namun kendala yang sangat besar itu saya rasa tidak ada. Karena setiap operasi direncanakan dengan matang, dikoordinasikan antara penanggung jawab dan pelaksana, dilaksanakan sesuai prosedur dan dievaluasi setiap tahap.

Penyebab kegagalan suatu operasi dan solusi?

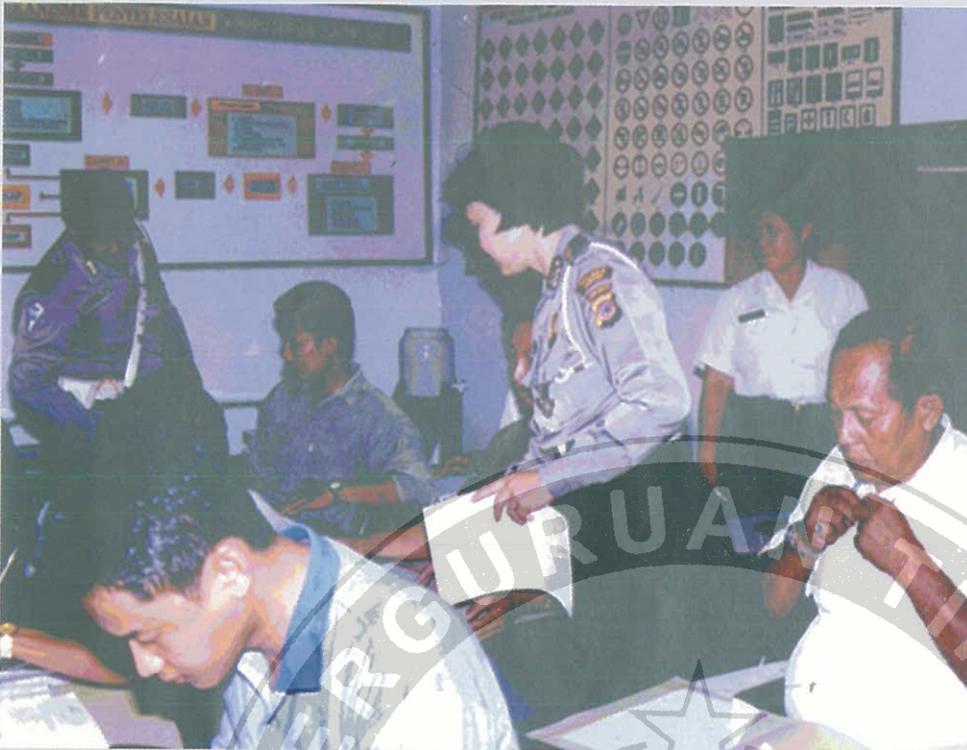
Salah satu penyebab adalah kurang adanya komunikasi atau koordinasi yang efektif, kemudian juga adanya penyimpangan prosedur dan kesalahan teknis, sehingga hasilnya tidak optimal. Solusinya, antara lain setiap selesai melakukan operasi kita lakukan evaluasi. Evaluasi secara terus menerus terutama setelah selesai pelaksanaan operasi secara bersama-sama.

Trik-trik yang dilakukan dalam menggalang anggota?

Untuk keluar saya banyak berhubungan dengan masyarakat, bertatap muka, kemudian untuk yang kedalam saya mencoba menciptakan situasi kerja yang menyenangkan, melakukan komunikasi, menanamkan kesadaran perannya dibidang



• Selalu siap ikut bergabung dengan anggota pada waktu siang maupun malam hari dalam melaksanakan suatu kegiatan operasi.



• Pada kegiatan memonitor langsung adalah salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi anggota.

masing-masing. Jadi masing-masing harus mengetahui peran dan tugasnya. Tentu saja saya mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dilaksanakan oleh anggota.

Pengalaman menarik sejak duduk menjadi Kapolres?

Untuk ditengah masyarakat awal-awalnya saat saya hadir di acara-acara seringkali menggunakan pakaian preman, pada mulanya memang banyak yang belum tahu, sehingga mengajak saya bicara dengan akrab. Mereka belum tahu saya seorang Kapolres, tetapi setelah mereka tahu saya ini Kapolres, akhirnya mereka "menunjukkan" rasa sungkan-sungkan. Tetapi saya tetap menunjukkan sikap penuh keakraban dan mengharapkan mereka jangan sungkan-sungkan.

Kepuasan apa yang sudah diperoleh sejak Kapolres dan apa visi kedepan?

Dari lebih kurang tiga bulan saya bertugas disini saya rasakan bahwa anggota kami mulai dari Waka, para Kabag, para Kasat maupun para Kapolsek banyak memberikan dukungan tentu saya sangat berterimakasih

dan sangat bangga. Kemudian suasana kerja juga menyenangkan, mereka akrab satu dengan yang lain, ini merupakan suatu kepuasan bagi saya, karena dengan begitu maka hasil kerja bisa lebih meningkat. Terbukti antara lain dengan cepainya bidang Reskrim melakukan penangkapan tersangka satu kasus tindak pidana.

Visi kedepan adalah Kabupaten Subang ini lebih aman. Kalau dulu daerah Subang ini ranking kerawanan menduduki ke - 9, mudah-mudahan dengan penugasan saya disini rankingnya bisa menurun bahkan kalau bisa diatas ranking ke - 10.

Moto kerja dan moto hidup?

Tentu saja saya melakukan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan penuh tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan kemudian jangan "aji mumpung". Tidak malu bertanya, bekerja sesuai ketentuan. Kita jalani hidup ini seperti air mengalir dan berupaya agar hari ini lebih baik dari hari kemarin.

Kesan dan kritik terhadap Polwan tentang : Penampilan, Disiplin dan Kinerja.

Untuk penampilan, banyak rekan-rekan

Polwan kita yang penampilannya sudah bagus, namun walaupun demikian ada beberapa yang masih belum bisa menjaga kondisi berat badannya, masih ada yang kelihatan gemuk. Dari segi disiplin, saya rasa Polwan itu sudah bagus. Namun demikian tetap perlu ditingkatkan. Demikian juga soal kinerja, Polwan itu saya lihat lebih rajin dan teliti, begitu saya lihat rekan-rekan saya.

Harapan dan pembinaan apa yang diharapkan terhadap Polwan?

Yang saya harapkan dalam bidang pembinaan karir tentunya diharapkan anggota Polwan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bersaing dengan polisi laki-laki sehingga bisa menduduki jabatan-jabatan strategis. Kemudian dari lingkungan Satker tentu saja perlu adanya persaingan yang sehat, mengadakan komunikasi satu dengan yang lain sehingga dapat menularkan pengalaman masing-masing sehingga dengan demikian akan dapat mencapai kemampuan yang mendukung.

Pesta demokrasi (Pemilu) telah diambang pintu, apa yang telah dipersiapkan?

Persiapan dalam rangka menghadapi pesta demokrasi (pemilu) kita melihat dari tahap-pertahap. Saya mengarahka kepada anggota agar masing-masing fungsi atau bagian membuat rencana kegiatan masing-masing disesuaikan dengan tahapan dalam Pemilu. Misalnya tahapan pendaftaran calon maupun pendaftaran partai itu nanti fungsi Intel melakukan kegiatan deteksi dini, pembuatan Kirka Intel, fungsi Samapta melakukan pelatihan atau peningkatan kemampuan fisik ataupun kemampuan tertentu, jadi masing-masing tahap dan masing-masing fungsi menyusun rencana kegiatannya.

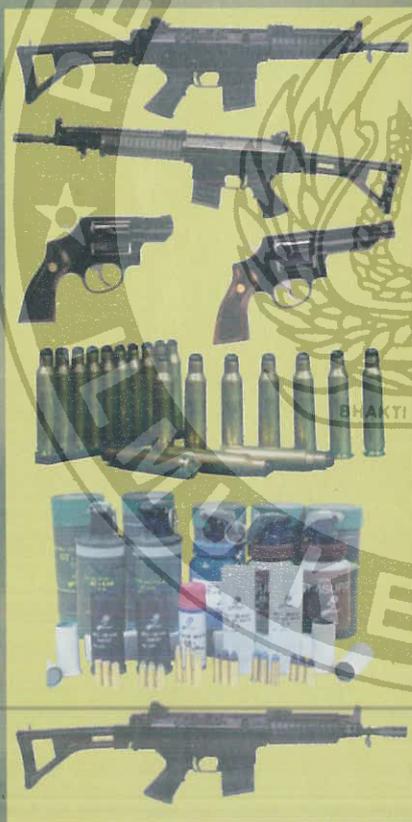
Kita patut bersyukur atas kebijaksanaan Kapolri yang signifikan tersebut, karena awalnya ada semacam keraguan seorang Polwan memimpin di wilayah. Dengan kebijakan Kapolri mendudukan anggota Polwan menjadi seorang pemimpin di wilayah maka keraguan tersebut terjawab sudah. Pemimpin wilayah untuk Polwan masih sangat terbuka lebar. Bagaimana Polwan yang lain, berminat...!!!

Maka mari persiapkan diri di segala bidang, singsikan lengan, bersama kita maju. Bravo Polwan. ■



DIREKSI DAN SEGENAP PT PINDAD

*Mengucapkan
Dirgahayu Bhayangkara Ke-57
1 Juli 2003*



**PINDAD SIAP
MENDUKUNG TUGAS
KESAMAPTAAN POLRI
DENGAN INOVASI
PERSENJATAAN
DAN PERLENGKAPAN
YANG HANDAL DAN MUDAH**

PT PINDAD

Jl. Jend. Gatot Subroto N0.517 Bandung 40264, INDONESIA

Phone : (62-22) 730 6655, 730 5092 Facsimile : (62-22) 730 4095, 730 1222 E-mail : info@pindad.com



• *Performance Pospol, adalah salah satu bagian terdepan yang dinilai pertama oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari Kepolisian*

KOMENTAR MASYARAKAT TENTANG KINERJA POS POLISI (POSPOL)

Dibentuknya pospol di wilayah-wilayah rawan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan Polri terhadap masyarakat, dan meningkatkan daya pengamatan Polri terhadap masyarakat dan lingkungannya di mana pospol itu berada.

Bentuk pospol berupa : pospol tetap/permanen, pospol sementara, dan pospol mobile. Masing-masing bentuk diadakan sesuai dengan kebutuhan, (situasi medan, situasi lalu-lintas, situasi kerawanan kriminal, situasi keramaian masyarakat, dan lain-lain).

Hasil poling Radio Metro 911 tanggal 17 April 2003 pukul 07.30-09.00, dari sejumlah pendengar yang menyampaikan pendapatnya hampir 100 % setuju adanya pospol pada daerah-daerah rawan, dengan catatan pospol tersebut benar-benar proaktif dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa keluhan tentang pospol yang masuk dalam poling tersebut, antara lain :

1. Bahwa pospol kurang proaktif terhadap situasi lalu-lintas di lingkungannya.
2. Bahwa pospol sering kosong, bangunan pospol dimanfaatkan oleh pedagang asongan atau pihak lain yang bukan haknya.
3. Bahwa anggota pospol tidak pernah me-

laksanakan patroli di lingkungan masyarakat sekitar pospol tersebut, sehingga masyarakat tidak mengenal anggota pospol di situ, sebaliknya anggota pospol-pun tidak mengenal masyarakat di sekitarnya

4. Anggota pospol membiarkan pak ogah (anggota masyarakat yang ikut mengatur lalu-lintas dengan meminta imbalan uang) beraksi di depan pospol tersebut, sehingga lalu-lintas macet.

5. Tidak mau menerima laporan korban penjahretan (pencurian dengan kekerasan) yang terjadi di dekat pospol yang bersangkutan, dengan alasan bukan wilayah tugasnya, sehingga korban bingung kemana harus melapor.

6. Dan banyak lagi keluhan lainnya.

Keluhan masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa kinerja anggota di lapangan belum sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan Pimpinan Polri saat ini, yaitu Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bahwa tingkat pelayanan di pospol masih rendah, dan kurang responsif terhadap lingkungan.

Kondisi tersebut bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang sering ditemukan pada pospol, antara lain :

1. Kurangnya personil.
2. Kurangnya pengawasan dan pengendalian, terutama pada jam rawan.
3. Tidak adanya alat komunikasi.
4. Tidak adanya pendukung kebutuhan primer (toilet, kamar mandi, alat makan/minum, penerangan yang cukup).
5. Kurangnya perawatan, sehingga pospol jadi kumuh.
6. Kurangnya rasa tanggung jawab dari anggota pospol.
7. Kinerja pospol dan kepentingan pospol di wilayah tersebut tidak pernah di anev.
8. Kurangnya dukungan kesejahteraan.

Upaya memperbaiki kinerja pospol merupakan **tantangan** sekaligus **seni** bagi para kasatwil. Kita mengetahui bahwa prinsip-prinsip dalam Community Policing, antara lain : "Polisi harus mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, oleh karena itu polisi harus mendekati dengan lingkungan masyarakat, agar senantiasa mengetahui apa yang berkembang di masyarakat dan mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat". Atas dasar prinsip tersebut, Polri dituntut harus lebih banyak di lingkungan masyarakat. Salah satu sarana untuk itu adalah pospol. Poling di radio metro-pun semua setuju ada pospol di wilayah-wilayah rawan, bahkan kalau perlu di tiap-tiap RW, dengan catatan kinerjanya proaktif.

Mengingat keluhan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas, dan mengingat pentingnya keberadaan pospol di wilayah-wilayah rawan, maka para Kasatwil, khususnya para Kapolres dan Kapolsek agar mengambil langkah-langkah

1. Reinventarisasi pospol-pospol yang sudah ada, baik kondisi bangunan, jumlah personil, peralatan, kepentingan pospol pada wilayah tersebut, maupun kinerjanya.
2. Lakukan "hearing" atau dialog dengan masyarakat tentang kondisi, kinerja dan kepentingan pospol yang ada di wilayah tersebut.
3. Melengkapi pospol dengan peralatan yang dibutuhkan untuk operasional maupun kebutuhan-kebutuhan primer anggota pospol yang bersangkutan.
4. Melatih kembali kemampuan yang berkaitan dengan tugas di pospol.
5. Melakukan pengawasan rutin maupun insidental. Manfaatkan masyarakat sekitar sebagai pengawas yang melekat di sekitar pospol.
6. Lakukan pengendalian tugas, pengarahan/app dan melaksanakan anev terhadap kinerja pospol tersebut.
7. Mewajibkan pospol membuat daftar permasalahan masyarakat di sekitar pospol, pola penaggulangan dan hasil yang dicapai.
8. Meningkatkan patroli dialogis dan kegiatan bhakti polri bagi masyarakat sekitar pospol.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan, peraturan perundang-undangan, melalui dialog pribadi, dialog kelompok, pelatihan-pelatihan dan kerjasama kemitraan. ■

MENYIKAPI BERITA YANG KELIRU

Era transparansi dan keterbukaan sekarang ini, membuat polri tidak bisa lagi menyimpan informasi kecuali untuk bahan penyidikan dan rahasia negara.

Kontrol masyarakat terhadap kinerja Polri semakin ketat, tajam dan berani. Demikian pula tuntutan masyarakat terhadap pelayanan polri semakin variatif, ingin serba cepat, tuntas dan lugas. Setiap kelemahan polri akan dipublikasikan atas inisiatif anggota masyarakat itu sendiri maupun atas inisiatif masyarakat pers selaku stake holder polri. Hal ini terbukti dengan adanya protes masyarakat pers di suatu wilayah, di mana kapolres wilayah yang bersangkutan telah melakukan tindakan menghapus sebagian informasi pada kaset hasil wawancara radio

El Shinta dengan kapolres yang bersangkutan.

Kondisi tersebut harus disikapi secara profesional, di mana Polri harus bertindak sesuai aturan dan prosedur, melakukan kerjasama /kemitraan, dalam upaya mengatasi kekurangan Polri, dan melakukan pelayanan yang semakin cepat, tuntas serta penuh keramahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Kasatwil / Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Ciptakan kerjasama yang baik, suasana yang kondusif, dalam mengatasi kekurangan atau kemelut yang terjadi.
2. Pahami Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran secara mendalam, dan sosialisasikan kepada anggota, agar

mereka mengerti dan mampu bertindak dengan benar jika terdapat masalah dengan pers.

3. Persiapkan data dengan lengkap, dan susun dengan baik informasi yang akan disampaikan kepada pers. Artinya bahwa para kasatwil dituntut mempunyai kemampuan membuat berita dengan baik.
4. Jika ada informasi keliru yang akan diberitakan, segera lakukan ralat, disertai dengan fakta yang ada. Gunakan hak jawab pada media massa yang bersangkutan, pengaduan

Kepada Dewan Pers, dan lakukan penyidikan jika dianggap perlu. Penggunaan hak jawab dan pengaduan kepada Dewan Pers, tidak menggugurkan wewenang untuk menyidik kasus tersebut.

5. Informasi yang berkaitan dengan penyidikan dan diperkirakan akan mengganggu penyidikan, agar tidak dikonsumsikan kepada publik terutama media massa, sepanjang penyidikan belum selesai. ■

KENAIKAN TUNJANGAN BABINKAMTIBMAS & TUNJANGAN KEPERLUAN KHUSUS ANGGOTA POLWAN DI LINGKUNGAN POLRI

Efomasi Polri harus diikuti dengan perubahan paradigma, di mana anggota Polri harus menempatkan diri sejajar sebagai mitra dengan masyarakat, menjemput bola dengan banyak kegiatan di masyarakat, serta mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Kunci pelaksanaan paradigma itu terletak pada Babinkamtibmas yang harus aktif dan mampu sebagai fasilitator dalam menangani masalah masyarakat.

Mengingat pentingnya peran Babinkamtibmas dan tingginya kegiatan yang harus

dilaksanakan, dihadapkan kepada tingginya tuntutan masyarakat dan kenaikan harga yang cukup signifikan, pimpinan Polri menganggap perlu penyesuaian biaya opsional.

Kebijaksanaan sesuai dengan Skep No. Pol. : Skep/227/IV/2003 tentang kenaikan tunjangan tersebut adalah :

1. **Tunjangan Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas)** yang semula sekitar **Rp. 50.000,-** menjadi **Rp. 100.000,- per orang / bulan.**
2. **Tunjangan keperluan khusus kewa-**

nitaan bagi anggota Polisi Wanita (tunsus polwan) yang semula sebesar **Rp. 30.000,-** menjadi **Rp. 50.000,- per orang / bulan.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar para Kasatker/Kasatwil mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sosialisasikan kepada seluruh anggota yang ada di jajarannya.
2. Uang ini bukan tunjangan jabatan Babinkamtibmas tetapi biaya opsional Babinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya.
3. Bahwa perhatian pimpinan harus dijawab dengan peningkatan prestasi para Babinkamtibmas yang semakin dekat dengan masyarakat, makin banyak informasi yang diperoleh dan mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat.
4. Inventarisir kesulitan / hambatan yang menyangkut Opsional Babinkamtibmas.
5. Perbaiki sistim dan kinerja babinkamtibmas, libatkan masyarakat sebagai pengawas. ■

POLRI PEDULI DENGAN LINGKUNGAN

Pengrusakan lingkungan hidup masih terus berlangsung dikalangan masyarakat kita, ini ditandai dengan masih berlangsungnya penjarahan hutan, membuang sampah sembarangan, terutama plastik dan lain-lain masih terus berlangsung di berbagai daerah dan tempat.

Dampak dari tidak pedulinya terhadap lingkungan, menyebabkan berbagai bencana alam seperti : banjir, kekurangan air bersih, kebakaran hutan, penyakit menular dan lain-lain.

Dalam kondisi demikian Presiden Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 5 April 2003 menghadiri acara penataan lingkungan hidup dan eko-sistem dilingkungan Akademi Kepolisian (AKPOL) sebagai satu kepedulian polri terhadap pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup di tanah air.

Dalam acara pelaksanaan penataan lingkungan hidup dan eko-sistem tersebut presiden mengamanatkan secara lisan sebagai berikut :

- Masalah lingkungan hutan maupun lahan hijau di perkotaan yang rusak menjadi ancaman seiring dampak pembangunan yang tidak ramah lingkungan, bila hal ini dibiarkan, bukan tak mungkin Indonesia akan kehilangan sumber daya air murni yang berkualitas.

- Bila kehilangan sumber daya air itu terjadi, Indonesia yang dua pertiga daerahnya adalah lautan terpaksa melakukan penyulingan air laut menjadi air murni untuk mencukupi

kebutuhan air akibat rusaknya lingkungan hidup.

- Sehubungan dengan kerusakan itu, marilah kita mulai memperbaiki diri dan tak lagi mengulang perusakan lingkungan, memperbaiki lingkungan yang rusak perlu



• Dampak dari tidak pedulinya terhadap lingkungan, menyebabkan berbagai bencana alam.

dilakukan melalui gerakan ramah lingkungan. Lingkungan yang ramah sangat mempengaruhi seseorang dalam memantapkan diri bekerja untuk masyarakat.

- Lingkungan yang begitu luas di Akademi Kepolisian kurang lebih 125 hektar sebagian diantaranya harus dipertahankan sebagai hutan kota dan lahan hijau supaya sejuk dan nyaman.

- Lingkungan di Akademi Kepolisian memiliki potensi untuk menjadi salah satu tempat untuk peresapan air di wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya.

- Dalam penghijauan ini jangan hanya sekedar seremonial, namun harus dilakukan secara berkelanjutan. *Kalau saya disuruh menanam pohon, hari ini saya siram, dua jam kemudian siapa yang memelihara pohon ini kembali.*

- Sekiranya aparat personil dari Akademi Kepolisian adalah orang cinta lingkungan dan ramah, dia bisa menghargai dirinya dan mengerti posisi terhormatnya untuk menegakkan hukum terhadap perusak lingkungan.

- Taruna Akademi Kepolisian yang belajar di lingkungan yang ramah, memantapkan dirinya kelak sebagai perwira.

Seorang perwira adalah dengan disiplin tinggi, harga diri, dan citra dalam dirinya yang menjadikan dia disebut perwira yang senantiasa menjaga citra dan kehormatan tugas, tanpa itu dia bukan perwira meskipun berpangkat Jenderal.

Demikian amanat Presiden pada acara tersebut, dan menindak lanjuti arahan dimaksud, maka diharapkan agar para Kasat-wil/ Kasatker untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Laksanakan koordinasi lintas sektoral dan sosialisasikan tentang hari lingkungan hidup.
2. Lakukan penghijauan dilingkungan sekitar Polri (kantor, asrama, pospol, dan lain-lain).
3. Tindak tegas terhadap perusakan lingkungan, penjarahan hutan dan sebagainya.
4. Tingkatkan kegiatan untuk masyarakat (Bhakti Polri) dalam hari lingkungan hidup. ■

EMPATI PEMIMPIN POLRI



Jauh sebelum Opslihkam Pemulihan Keamanan (Opslihkam) maupun keadaan darurat militer di Aceh, sudah dah banyak korban anggota Polri yang meninggal dunia maupun luka berat/luka ringan. Sejak diberlakukan darurat militer, dimana suasana tempur dengan ketegangan yang selalu mengganggu psikologis setiap anggota masyarakat, khususnya aparat keamanan, juga telah jatuh korban.

Sejak Opslihkam sudah jatuh korban anggota Polri 231 orang meninggal dunia dan keluarga para korban yang yang ditinggalkan adalah 118 orang istri. Sedangkan sejak diberlakukannya darurat militer sudah jatuh korban anggota Polri 3 orang meninggal dunia, tentunya semua ini perlu mendapat perhatian pimpinan dan rekan-rekan Polri terutama terhadap anak-anak yang ditinggalkan.

Melihat jumlah korban dan jumlah keluarga yang ditinggalkan yang demikian

banyak, maka pimpinan Polri sangat prihatin. Kapolri sebagai seorang pemimpin sangat memperhatikan kondisi itu dan sangat empati, sampai tidak bisa menahan air mata ketika memberikan pengarahan dihadapan para perwira dan para komandan lapangan di Banda Aceh tanggal 1 Juni 2003 sebagai seorang komandan beliau merasa terharu dan bangga kepada para anggota yang bersemangat dan gigih menjalankan tugas negara dalam memberantas kelompok Gerakan Separatis Aceh (GSA) di propinsi NAD.

Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut :

1. Tugas yang diemban anggota Polri di NAD memang cukup berat, namun mulia karena membawa nama bangsa dan negara. Kita tidak ingin bangsa ini bercerai berai.

2. Bagi putra-putri anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugas di Aceh, akan diangkat menjadi anak asuh dan akan diperhatikan hak-haknya, di antaranya pendidikan akan ditanggung sampai tingkat SLTA.

Menyikapi kondisi tersebut di atas dan dalam menjabarkan arahan Kapolri, beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh para Kasatwil/Kasatker antara lain :

1. Tingkatkan kewaspadaan dan kerjasama dengan masyarakat, guna memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dalam rangka membasmi Gerakan Separatis Aceh dimanapun berada.
2. Bagi anggota yang bertugas di NAD, pedomani dan laksanakan standing operation procedure (sop) yang berlaku di daerah operasi NAD, guna meminimalkan jatuhnya korban.
3. Bagi Kasatwil di luar wilayah NAD, khususnya yang berada di sekitar NAD, tingkatkan kerjasama antar Satwil dan lakukan kegiatan imbalan guna mencegah penyusupan anggota GSA ke wilayahnya masing-masing.
4. Bagi Kasatwil/Kasatker yang anggotanya gugur dalam pengamanan operasi di wilayah NAD, agar mengambil langkah-langkah sesuai TR Kapolri No. Pol. :TR/349/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 yaitu :
 - a. Apabila ada anggota Polri yang gugur/tewas diberikan petunjuk sebagai berikut :
 - Penerimaan/penyambutan jenazah anggota Polri yang gugur/tewas dilaksanakan sendiri oleh Kapolda dengan upacara di bandara setempat.
 - Dalam hal penerimaan/penyambutan jenazah di bandara Soekarno Hatta, pelaksanaan diterima langsung oleh Kababinkam Polri atau Kakorbrimob Polri.
 - Pemakaman dilakukan di tempat setempat, dengan Irup Kasatwil Polri tertinggi di wilayah itu, dihadiri seluruh Perwira dan anggota dengan pakaian dinas upacara.
 - b. Bagi keluarga/ahli waris yang ditinggalkan, segera diberikan hak-hak dan santunannya secara penuh pada kesempatan pertama.
 - c. Bagi anak almarhum yang ditinggalkan, diangkat sebagai anak asuh oleh pejabat Polri baik di pusat ataupun di daerah sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan SLTA. ■

MENYIAPKAN PELAKSANAAN TUGAS POLRI KEDEPAN

Pada tanggal 21 s/d 23 April 2003 telah berlangsung Raker Polri Tahun 2003 yang diikuti oleh Pejabat Teras Mabes Polri dan semua Kapolda. Pada Rapat Kerja tersebut telah dibahas tiga issue penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri kedepan yaitu :

1. Pelaksanaan validasi organisasi Polri
2. Pemantapan profesionalisme Polri, serta
3. Persiapan Polri melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2004.

MASALAH VALIDASI ORGANISASI

Penataan organisasi Polri atau kita kenal dalam istilah Validasi Organisasi dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk penegasan peran dan tugas masing masing fungsi.
2. Dalam rangka menerapkan prinsip efisiensi, berupa penyebaran kekuatan secara proporsional, mengurangi adanya tumpang tindih dan penggabungan satuan yang volume kerjanya relatif kecil.
3. Penekanan atas pengelompokan tugas Polri yang terdiri dari Polisi berseragam dan tidak berseragam.
4. Mengurangi rentang kendali.
5. Pemotongan Rantai Komando.
6. Penataan peran Polres.
7. Aplikasi dari Polisi Sipil.
8. Perlunya pertanggungjawaban profesi.
9. Prinsip fleksibilitas.
10. Penyusunan DSP dan Eselonisasi Jabatan.

Oleh karena itu sangatlah wajar apabila dalam pelaksanaan penataan organisasi ini telah menimbulkan berbagai implikasi di bidang: system dan metode, di bidang personel, di bidang material dan fasilitas, di bidang dukungan anggaran dan di bidang operasional. Untuk itu diharapkan agar seluruh jajaran Polri mempersiapkan diri.

Sebaik-baiknya dalam melaksanakan Validasi Organisasi tersebut, dalam hal :

- a. Kesadaran akan tanggungjawab bersama bersama untuk keberhasilan penataan

organisasi Polri.

- b. Untuk secara maksimal dapat mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawa masing-masing.
- c. Mendayagunakan sumber daya yang tersedia.
- d. Memprioritaskan penyelesaian permasalahan yang bersifat substansi dan dapat menghambat kegiatan operasional.
- e. Mencari solusi penyelesaian terhadap masalah-masalah teknis yang dihadapi dilingkup satuannya masing-masing.

PEMANTAPAN PROFESIONALISME POLRI

Sebagaimana disampaikan oleh Menko Polkam dalam Raker Polri yang lalu. Kunci keberhasilan Polri dimata masyarakat adalah bagaimana Polri dapat melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pelayan masyarakat. Adalah menjadi dambaan setiap insan Polri untuk menjadi Polisi yang dicintai rakyat. Hal ini merupakan obsesi atau visi yang ingin kita capai, namun sebelum sampai kearah itu Bapak Kapolri selalu menekankan bagaimana kita bias menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang dapat dipercaya oleh rakyat. Kata dipercaya ini mengandung arti yang sangat mendalam karena apapun tindakan yang dilakukan polisi sepanjang dilakukan secara professional, masyarakat akan dapat mempercayainya walaupun masyarakat itu berada pada pihak yang mendapat tindakan dari polisi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya profesionalisme itu kita pelihara, karena hal itu akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Didalam konteks melaksanakan tugas sebagai penegak hokum, inti dari profesionalisme Polri adalah kemampuan untuk melakukan proses penyidikan secara scientific crime investigation.

Hal itu telah kita tunjukkan dalam pengungkapan berbagai kasus besar seperti

pengungkapan kasus bom di Bali, Makassar, Jakarta, Medan dan tempat lain, serta penanganan kasus-kasus besar lainnya.

PERSIAPAN POLRI MELAKSANAKAN TUGAS PENGAMANAN PEMILU 2004

Dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu, Polri telah banyak pengalaman, namun berdasarkan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui karena berhubungan langsung dengan tugas Polri seperti :

1. Setidaknya ada tiga peran pokok Polri dalam Pemilu 2004 yang akan datang, yaitu sebagai petugas pengamanan seluruh rangkaian proses Pemilu, sebagai penyidik terhadap pelanggaran UU Pemilu dan sebagai Anggota Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kecamatan.
2. Pemilu 2004 dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 5 April 2004, dan seluruh rangkaian Pemilu terdiri dari 10 (sepuluh) tahap, yang diawali dengan pendaftaran pemilih diakhiri dengan pengucapan sumpah/janji Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota, dimana tiap-tiap tahap memiliki kerawanan tersendiri yang harus diketahui oleh seluruh jajaran Polri sehingga dapat mempersiapkan pola pengamanan yang sebaik-baiknya.
3. Mekanisme penyidikan pelanggaran tindak pidana Pemilu menggunakan hukum acara tersendiri, dimana semua kasus yang disidik Polri diterima melalui Panitia Pengawas Pemilu.
4. Panitia Pengawas yang bertugas meneliti berbagai permasalahan, seperti pelanggaran pidana diserahkan ke Polisi, dan menyelesaikan hal-hal yang bukan pelanggaran pidana dalam sidang penyelesaian sengketa. Oleh karena itu penunjukkan anggota Polri untuk duduk dalam Panitia Pengawas hendaknya merupakan Personel terpilih yang menguasai perundang-undangan Pemilu dan cakap untuk bekerja dalam mekanisme penyelesaian sengketa diluar pelanggaran hukum yang kemungkinan akan banyak ditemui.

Penjelasan diatas untuk sekedar mengingatkan kita kembali atas segala arahan yang Perlu untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap personel Polri. ■



PERUBAHAN BENTUK/ DISAIN DAN WARNA TOPI LAPANGAN POLRI

Field cap / topi lapangan yang digunakan sekarang ini adalah sesuai dengan **Skep Kapolri No. Pol.: skep/1429/IX/2001** tanggal **19 September 2001** tetapi belum menggambarkan ciri Polri (tidak ada lambang Tribrata).

Bahwa lambang kepangkatan di topi lapangan kemungkinan dapat menimbulkan barrier psikologis dalam hubungan atasan dengan bawahan sebagai patner / teman kerja.

Dalam upaya mengeliminir masalah tersebut, perlu perubahan sesuai dengan **Skep Kapolri No. Pol. : Skep/299/V/2003** tentang perubahan bentuk / disain dan warna topi lapangan polri sebagai berikut :

Bentuk

1. Topi lapangan model softcap

2. Bagian depan terdapat gambar Tribrata yaitu :

- a. Untuk golongan Perwira berwarna kuning
- b. Untuk golongan Bintara dan Tamtama berwarna putih

3. Pada bagian klep khusus untuk golongan Pati dan Pamen terdapat hiasan gambar :

- a. Untuk pati gambar untaian bunga kapas, daun kapas dan buah padi :
 - Jumlah gambar daun kapas 17 helai
 - Jumlah bunga kapas 8 helai
 - Jumlah buah padi 45 butir
- b. Untuk pamen gambar untaian buah padi

- c. Bagian belakang menggunakan ban pengaman model gigi

Warna dan pemakaian

4. Topi lapangan polri warna coklat tua dengan lambang Tribrata pada bagian depan, yaitu warna kuning untuk Perwira dan warna putih untuk Bintara dan Tamtama
5. Dipakai pada saat menggunakan pakaian seragam dinas :
 - a. Pakaian dinas khusus warna *two tone (PD-SUS)*
 - b. Pakaian dinas harian (PDH) bagi para Kasatwil pada saat melakukan inspeksi lapangan

Untuk itu kepada Kasatker/Kasatwil untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelajari dan pedomani Skep Kapolri tersebut
2. Jelaskan/sosialisasikan kepada anggota tentang tujuan, makna serta aturan pakainya
3. Lakukan pengecekan kebawah dalam pelaksanaannya
4. Jika dilakukan pengadaan swadaya topi lapangan di wilayahnya masing-masing, agar spesifikasinya mengacu kepada petunjuk **Skep Kapolri No. Pol. : Skep/299/V/2003**. ■

Kapolri Kunjungi Polda-Polda Kalimantan

Kapolri Jenderal Polisi **Drs. Da'i Bachtiar** dan Pejabat Teras Mabes Polri, melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah di Kalimantan. Antara lain *Polda Kalteng, Polda Kaltim, Polda Kalbar dan Polda Kalsel*.

Dalam kunjungan kerja selama 3 hari tersebut Kapolri melakukan peninjauan ke Mako Brimob dan SPN untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi anggota Polri di daerah dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu juga Kapolri menyampaikan terima kasih atas keberhasilan Brimob dalam mengemban tugas mengamankan negara khususnya di wilayah NAD.

Selanjutnya Kapolri mengingatkan kembali agar anggota Brimob selalu siap menjalankan tugas yang dibebankan karena kehadirannya sangat dibutuhkan oleh

masyarakat daerah-daerah yang mengalami konflik. Lebih lanjut lagi Kapolri menyampaikan agar setiap anggota Brimob mempertahankan ketabahan dan keuletan, dimana sosok tugasnya adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sehingga kehadiran Brimob diharapkan tercipta kedamaian yang menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Pada SPN-SPN yang menjadi dapur bagi Polri, dan untuk menghasilkan anggota Polri yang professional, Kapolri selalu mengingatkan kepada para instruktur dan gadik dalam mendidik siswa hendaknya sesuai dengan kurikulum Polri. Sehingga setelah selesai pendidikan para anggota Bintara tersebut dapat menerapkan dan mengembangkan fungsi kepolisian di lapangan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan tidak mengesampingkan penegakan hukum sehingga

dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Karena mustahil harapan itu dapat tercapai tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Disamping itu guna menunjang belajar mengajar di SPN-SPN, Kapolri telah memenuhi sarana prasarananya.

Kepada jajaran Kepolisian Polda, Kapolri menyampaikan kembali kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pimpinan dalam, yang antara lain dijelaskan guna pelayanan Polri kepada masyarakat secara cepat. Saat ini Polri memprioritaskan alat transportasi dan alat komunikasi untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

Bersama Kapolri, Pejabat Teras Mabes yang ikut mendampingi diantaranya, *Kabareskrim Polri, Irwasum Polri, Kababinkam Polri, Kabaintelkam Polri, Deops Kapolri, Delog Kapolri, Desumdaman Kapolri, Kadiv Humas Polri, Kadiv Propam Polri, Kadiv Binkum Polri, Kakorbrimob Polri dan Perwira Tinggi lainnya serta Pengurus Pusat dan Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari*.

Kesepakatan Bersama Antara POLRI dengan BPMIGAS

Pada hari Selasa, 20 Mei 2003 telah dilaksanakan "Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Pengamanan Kegiatan Operasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi" antara Polri yang diwakili oleh Kapolri dengan BPMIGAS yang diwakili oleh Kepala BPMIGAS. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut hasil forum Komunikasi Sekuriti BPMIGAS dengan Kontraktor Kerjasama (KKS) tanggal 29-31 Januari 2003 di Bali.

Adapun kesepakatan ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing guna peningkatan penanganan gangguan keamanan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, meliputi:

1. Pelaksanaan Pengamanan
2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Bersama
3. Pembinaan Kemampuan Pengamanan.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama ini akan segera ditindaklanjuti dengan pembuatan Petunjuk Lapangan (JUKLAP) atau Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagai



• Upacara Penandatanganan Kesepakatan Beersama dilakukan antara Kapolri dengan Kepala BPMIGAS

pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi para Kapolda.

Penanggung jawab tindak lanjut penyelenggaraan Kesepakatan Bersama peng-

amanan ini adalah :

- Tingkat Pusat adalah Deputi Umum BPMIGAS dan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Polri.
- Tingkat Daerah Pimpinan Kontraktor KKS dan Kepala Kepolisian Daerah setempat.

Kepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dan atau dapat diubah sebelum jangka waktu. ■ (Div. Humas Polri)

RAKOR KOMUNITI DEOPS POLRI

Deops Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Syachrudin Pagar Alam atas nama Kapolri Jenderal Pol Drs. Da'i Bachtiar telah membuka Rakor Komuniti Deops Polri bertempat di Pusdik Secapa Polri Sukabumi Jabar. Rapat diikuti oleh jajaran Pusdalops, Polairud, Pus Brimob, Dit Lantas, Dit, Sabhara seluruh Indonesia dan Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Komjen Syachrudin mengatakan, perkembangan Polri sampai kapanpun tidak akan terlepas dari perkembangan masyarakatnya

atau dengan kata lain wajah Polri adalah wajah masyarakatnya. Karenanya Polri saat ini dan yang akan datang harus benar-benar dapat berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakatnya, yang mengarah kepada kehidupan bernegara yang lebih demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam tatanan masyarakat yang madani.

Selanjutnya dikatakan oleh Kapolri, kondisi keamanan dalam yang penuh dengan berbagai perubahan yang kompleks mempunyai arti bagi Polri sebagai beban tugas yang harus dihadapi dan sekaligus

harus dapat datasi secara professional dan profesionalisme yang handal. Sehingga dapat memberikan kualitas perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karenanya Kapolri berharap seluruh materi Rakor yang disampaikan, didiskusikan, hasilnya harus dapat dijadikan landasan dan dasar berpijak bagi seluruh jajaran Kepolisian dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama bagi mereka yang bertugas dibidang operasional.

Akhirnya Kapolri mengharapkan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk bersamasama berada dalam satu visi dan misi Kepolisian dengan mengedankan perannya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan persuasive dan preventif. ■

Apel Siaga Satpam Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2004

Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 dilaksanakan apel kesiapan operasional Satuan Pengamanan (Satpam) di wilayah Polda Jawa Barat. Apel siaga tersebut bertempat di lapangan PT. Kujang Kerawang, Jawa Barat, yang diikuti oleh 600 orang satpam sejawaran Polwil Purwakarta. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Kababinkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Adang Dorojatun. Upacara apel siaga satpam tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, Kakorps Brimob, dan Dirpolairud serta para pejabat Kepolisian yang lain.

Dalam amanatnya Kababinkam menyatakan bahwa Polri selaku pengemban fungsi Kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan-satuan pengamanan. Anggota satuan pengamanan sebagai warga negara telah diorganisir dalam ikut serta dalam tugas-tugas keamanan dalam bentuk satuan pengamanan. Polri juga bertugas membina masyarakat untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan juga Polri berwenang memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian Khusus, PPNS dan petugas pengamanan dalam bidang teknik kepolisian. Oleh karena itu apel siaga tersebut mengambil tema "Dengan meningkatkan kesiapan Satuan pengamanan untuk membantu tugas Polri dalam mewujudkan Kamtibmas mantab demi suksesnya pemilu 2004.

Pada akhir amanatnya, Kababinkam menyampaikan beberapa penekanan kepada para peserta apel antara lain: pertama, agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Polri. Kedua, agar diadakan Diklat kepada satuan pengamanan agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Ketiga, keterpaduan antara Satuan Pengamanan

dengan Polri akan membentuk ikatan satuan pengamanan yang kokoh. Keempat, khusus untuk jajaran kepolisian, agar lebih meningkatkan lagi satuan pengamanan secara berkelanjutan, mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas yang timbul.

Dalam wawancara persnya Kababinkam menyatakan bahwa dalam program kepolisian kedepan khususnya dalam pengamanan Pemilu 2004 kita mendasari apa yang dinyatakan didalam UU No.2 tahun 2002 tentang PPNS, Palsus dan Badan-badan Pengamanan Swakarsa, akan kita bangun dalam arti untuk menyiapkan diri dalam menghadapi Pemilu 2004. Satpam sebagai salah satu satuan pengamanan atau badan-badan keamanan swakarsa, kita persiapkan untuk itu. Jadi, konsep "Community Policing" bahwa Polri tidak mungkin bisa menjaga keamanan tanpa dibantu masyarakat, akan kita bangun terus.

■

Pelaksanaan Loka Karya Polri dan Pemilu 2004

Mabes Polri bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform In Indonesia menyelenggarakan Loka Karya sehari dengan topik "Polri dan Pemilu 2004". Loka Karya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2004, bertempat di Ballroom Hotel Le Meridien Jakarta.

Pelaksanaan Loka Karya tersebut bertujuan untuk memantapkan persiapan Polri menghadapi Pemilu 2004, melalui kegiatan sumbang pikir dari peserta Loka Karya mengenai pelaksanaan Pemilu 2004 diprediksi

akan membawa berbagai persoalan (negatif) baik yang ditimbulkan dampak perkembangan global maupun perkembangan didalam negeri, serta berlakunya UU Pemilu No. 12 Tahun 2003.

Hadir sebagai peserta dalam Loka Karya kurang lebih 150 orang dari kalangan Polri, Militer, Birokrasi pemerintahan, anggota KPU, anggota DPR, Mahasiswa, Pers dan perwakilan negara donor.

Makalah yang dibahas / didiskusikan antara lain:

- **Prof. DR. Ramlan Surbakti**
(Wakil Ketua KPU).
- **Dr. Ery Seda**
(Direktur Program Divisi Perempuan (CETRO)).
- **Stenly Aji Prasetyo**
(Institut Studi Arus Informasi)
- **Pataniari Siahaan**
(Anggota Komisi I DPRRI).
- **Topo Santoso, SH, MA**
(Fakultas Hukum UI)
- **Basrief Arif, SH**
(Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Kejaksaan RI).
- **Drs. Mulyana W. Kusuma**
(Anggota KPU).
- **Drs. Agun Ginanjar Sudarsa**
(Anggota Komisi II DPRRI)

■

7 Perwira Polri

Mendapat Penghargaan Bintang Bhayangkara

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar menyematkan tanda kehormatan "Bintang Bhayangkari Pratama" kepada 7 Perwira Tinggi Polri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 005/TK/Tahun 2003 tanggal 7 Februari 2003 di Rupattama Mabes Polri. Tanda kehormatan ini diberikan kepada mereka atas jasa-jasanya di bidang tugas Kepolisian yang telah menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok, dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Ke tujuh Perwira Polri yang mendapat-kan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama diantaranya adalah :

- Irjen Pol. Drs. R. Makbul Padmanegara (Kapolda Metro Jaya),
- Irjen Pol. Drs. I Dewa Ketut Gde Astika (Kapolda Sumut),
- Irjen Pol. Drs. Didi Kusumayadi (Kapolda Sumsel),
- Irjen Pol. Drs. Djuharnus Wiradinata (Delog Polri),
- Irjen Pol. Drs. Farouk Muhammad (Gubernur PTIK), dan
- Irjen Pol. Drs. Mudji Santoso
- Irjen Pol. Drs. Saleh Saaf (Kadivtelematika).



PELAKSANAAN RAKER POLRI 2003



Raker Polri tahun 2003 dengan tema "Melalui Raker Polri th 2003 Kita Mantapkan Reorganisasi dan Profesionalisme Polri Serta Pengamanan Pemilu 2004" telah dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 21 s/d 23 April 2003, diikuti oleh Pejabat Teras Polri dan seluruh Kapolda.

Sesuai dengan tema Raker, telah dibahas berbagai permasalahan dan merumuskan solusinya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan dan Pemantapan Profesionalisme Polri.
- b. Pemantapan pelaksanaan Reorganisasi Polri sesuai keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 dan No. Pol: Kep/54//X/2002 tanggal 17 Oktober 2002.

- c. Persiapan polri dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap rangkaian/proses Pemilu 2004.
- d. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri selama tahun 2002 dan TW - I 2003, termasuk penanganan terhadap berbagai masalah/kasus menonjol.

Di luar instansi Polri, peserta Raker telah memperoleh masukan dari beberapa pejabat pemerintah dan non pemerintah antara lain

- a. Menkopolkam RI menyampaikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah Polkam seperti masalah Aceh, Papua, Terorisme dan berbagai dinamika publik yang menonjol akhir-akhir ini.

- b. Kepala BIN, menyampaikan berbagai masalah dan kerawanan yang mungkin akan dihadapi pada pelaksanaan Pemilu 2004 serta peningkatan kerjasama antara BIN dengan Badan Intelijen Kepolisian.
- c. Ketua KPU menyampaikan rencana umum penyelenggaraan Pemilu 2004 dan berbagai permasalahan di bidang keamanan, dan pendatanganan MOU antara Polri dan KPU dalam Pengamanan Pemilu 2004.

Rapat kerja Polri tahun 2003, telah merumuskan beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Segera melakukan pembenahan, penyempurnaan terhadap hal-hal yang belum tuntas dari pelaksanaan Reorganisasi Polri, khususnya yang menyangkut hubungan tata kerja, pengisian personil dan dukungan anggaran/peralatan bagi dapatnya roda organisasi berjalan.
- b. Melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme Polri melalui pendidikan kejuruan, pengendalian tugas di lapangan, penambahan anggaran dan peralatan secara bertahap dan skala prioritas serta melembagakan proses penyidikan dengan menerapkan scientific crime investigation.
- c. Menuntaskan penyelesaian penyidikan kasus menonjol dan yang menjadi perhatian masyarakat guna menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- d. Memantapkan persiapan jajaran Polri dalam menghadapi Pemilu 2004 termasuk perhitungan anggaran (rencana kebutuhan) serta melakukan pelatihan-pelatihan guna menyiapkan personil Polri yang akan melaksanakan tugas sebagai :
 - Petugas Pengamanan Rangkaian Pemilu 2004.
 - Petugas Penyidik pelanggaran terhadap UU Pemilu dan peraturan lainnya.
 - Anggota Panwaslak Pemilu 2004 mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.
- e. Hal-hal lain yang dilakukan dalam rangkaian Raker antara lain, Kapolri telah menyerahkan kepada Para Kapolda sejumlah 400 kendaraan dinas roda 4 (KIA Sportage) yang akan dipakai sebagai kendaraan dinas Para Kapolres seluruh Jajaran Polri. ■

MOU ANTARA POLRI DENGAN PT ASKES INDONESIA

Bertempat di Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS. Sukanto, Kramatjati Jakarta Timur pada hari Rabu, 16 April 2003 diselenggarakan acara penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja-sama antara Polri dengan PT. Askes Indonesia. Acara ini menyangkut tentang pelayanan kesehatan bagi peserta Askes dengan keluarganya pada fasilitas Polri. Perlu diketahui bahwa RS. Sukanto adalah *Rumah Sakit Tingkat I* sebagai pusat rujukan medis bagi seluruh rumah sakit Bhayangkara Tingkat II, III dan IV yang tersebar diseluruh jajaran Kepolisian Negara Indonesia.

Perjanjian kerjasama antara PT. Askes dan Polri ini mempunyai nilai tambah yang

bermakna bagi kedua belah pihak, baik bagi PT. Askes sebagai Provider maupun bagi Pusdokkes Polri sebagai institusi yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dinilai dari semakin baik dan cepatnya pelayanan administrasi berupa prosedur pembayaran tagihan rumah sakit. Sinergi dari kerjasama ini sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para purnawirawan Polri yang pada kenyataannya lebih senang memilih berobat di fasilitas karena adanya kemudahan prosedur pelayanan dan adanya ikatan batin berupa hubungan emosional dengan rumah sakit Bhayangkara sewaktu masa dinasnyanya. Selain itu PT. Askes telah menetapkan tarif pelayanan dari

PT. Askes yang baru, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen rumah sakit Bhayangkara secara signifikan bagi para pelaksana di lapangan.

Dalam amanatnya Kapusdokkes Polri Brigjen. Pol. Dr. H. Bambang Ibnu S. menyatakan bahwa kehadiran rumah sakit Bhayangkara ditengah-tengah masyarakat fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, disamping ikut meningkatkan pelayanan kesehatan kepada personel Polri dan masyarakat umum, mempunyai tugas khusus dalam mendukung tugas operasional Polri. Bentuk dukungan kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit Bhayangkara adalah Unit Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban akibat kekerasan terhadap wanita dan anak dan pelayanan/perawatan kesehatan bagi pelaku tindak pidana berupa perawatan tahanan serta Kapusdokkes dalam kapasitasnya sebagai anggota BNN mempunyai tugas dalam upaya terapi dan rehabilitasi medis bagi korban narkoba. Para pejabat yang hadir dalam acara MOU antara Polri dan PT. Askes tersebut antara lain Kapusdokkes Polri, Karumkit rumah sakit Sukanto dan Direktur PT. Askes Indonesia. ■

Introspeksi

Sambungan dari halaman 30

Demikian pula halnya dalam konteks konflik Polri dengan TNI. Juga antara Polri dengan negara lain (sipil). Kalau dimasa lalu konflik itu lebih pada arus kepentingan atau konflik kepentingan (conflict interest), belakangan ini telah keluar jalur kewajaran, berubah menjadi konflik kekuasaan (conflict of power).

Mengapa semua terjadi? Minimal karena Polri di satu sisi, juga warga masyarakat serta aparat negara (sipil dan TNI) disisi lain, sama-sama tidak mampu mengendalikan diri.

Lihat saja kenyataan, betapa buruknya citra Polri dari penampilan polisi yang main gebuk, tendang, pukul, tembak (tidak mati sampai mati), disamping perampasan sejumlah harta milik pribadi, sebagaimana ditampilkan dalam siaran rutin oleh sejumlah TV swasta (Buser, Patroli, Sidik dan lain-lain).

Siaran informasi yang mungkin dimaksud untuk menimbulkan efek jera pemirsa itu, agar tidak melakukan, agar tidak melakukan tindak pidana kriminal, narkoba atau pelanggaran hukum lainnya, ternyata mendorong munculnya efek samping yang sangat negatif bagi Polri. Khususnya berupa

kesan umum aras perlakuan kasar, keras dan kejam anggota, kendati semua itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Pertanyaannya, mengapa siaran sejenis (yang tentu saja merupakan hasil kerjasama Polri dengan penyelenggara TV swasta, baru ditayangkan sekarang? Kenapa ketika Polri masih merupakan bagian ABRI, tidak ada sajian informasi langsung (spot news) seperti itu?

Apakah dengan siaran media elektronika tadi Polri ingin mengekspos kebebasan dan kemerdekaan Polri untuk berbuat apapun dalam melaksanakan tugas, fungsi serta perannya? Sementara di masa lalu (ketika belum pisah dari TNI, Polri tidak bakalan bias mengaktualisasikannya?

Pertanyaan itu perlu dijawab oleh Petinggi Polri. Mulai Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolwitabas, Kapoltabas, hingga Kapolsek. Bahkan juga oleh seluruh unsure pimpinan dan anggota dengan pangkat terendah, dilingkungan Markas Besar Polri, di kota besar, sedang dan kecil, hingga daerah terpencil.

Polri khususnya dan seluruh unsure negara dan bangsa kita pada umumnya, harus sama-sama menyadari persamaan dan perbedaan system nilai (value system) di lingkungan masing-masing. Baik yang berkaitan dengan keberadaan individu

(termasuk polisi), hingga yang bersinggungan langsung atau tak langsung dengan legalitas dan aspek formal kelembagaan masing-masing (terutama Polri).

Pemahaman ini, perlu diawali dan dimotori oleh sikap dan tindakan setiap anggota Polri. Mereka perlu selalu berpenampilan bersahabat, menarik, sekaligus profesional. Dengannya, setiap anggota Polri diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran perintah komando, bersikap profesional (antara lain polisi tidak gampang salah tembak, baik yang melukai apalagi mengakibatkan tewasnya sejumlah warga masyarakat di beberapa daerah), disamping senantiasa mampu menampilkan performance kelembagaan (Polri) serta anggota (polisi) sebagai jiwa masyarakat, sekaligus napas negara.

Untuk itu, apapun kebijakan serta sikap Polri, juga apapun tindakan oknum polisi, harus memenuhi standar profesionalisme. Namun, penggunaan standart profesionalisme ini, bukan hanya didasarkan atas tolak ukur kewenangan legal Polri, namun juga perlu dilandasi oleh system nilai yang berlaku di lingkungannya secara obyektif, sejauh semua itu tidak melanggar hukum. ■

*) Novel Ali, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI

No. Pol.: SKEP/197/IV/2003, Tanggal 08 April 2003

dan

No. Pol.: SKEP/217/IV/2003, Tanggal April 2003

Tentang

“PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI”

No. Pol : SKEP/197/IV/2003
Tanggal 08 April 2003

1. **Kombes Pol. Arifuddin Kamisi Smik**
NRP. 52030109 Jabfung Utama Delog Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Log Polda Sulsel.
2. **Kombes Pol. Drs. Sunarno**
NRP. 52110047 Karo Renbang Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Kermabang Rojakstra Derenbang Polri.
3. **Kombes Pol. Drs. Ton Aribawanto**
NRP. 52060077 Karo Renbang Polda Kaltim diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Renbang Polda Metro Jaya.
1. **Kombes Pol. Drs. Raden Achmad Kuswadi**
NRP. 53090030 Karo Renbang Polda NAD diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Renbang Polda Kaltim.
2. **Kombes Pol. Marsuid SH.**
NRP. 51060128 Kabid Binkum Polda Sulsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Irbid Jemen Opsnal II Itwil II Itwasum Polri.
3. **Kombes Pol. Tamanhe Pontolumin**
NRP. 50110152 Dir Intelkam Polda Sultra diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Renmin Div Propam Polri.
4. **Kombes Pol. Drs. Agus Dwiyanto**
NRP. 56010383 Karo Pers Polda Sulut diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Pers Polda Metro Jaya.
5. **AKBP. Drs. Rusli Lubis**
NRP. 55020298 Kasubbag Rengar Bag Ren Set Desumdaman Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Pers Polda Sulut.

6. **Kombes Pol. Drs. Ichlas Yusuf**
NRP. 50080294 Kapolwil Bone Polda Sulsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolwil Pekalongan Polda Jateng.
7. **Kombes Pol. Drs. Muhammad Idrus Gas-sing**
NRP. 55030375 Pamen Mabes Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolwil Bone Polda Sulsel.
8. **Kombes Pol. Drs. Dadang Djuhendi**
NRP. 52060064 Kapolwil Pare-pare, Polda Sulsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Irbid Jemen Opsnal I. Itwil III Itwasum Polri.
9. **Kombes Pol. Drs. Halba Rubis Nugroho**
NRP. 56120762 Dir. Reskrim Polda Sulut diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolwil Pare-pare Polda Sulsel.
10. **Kombes Pol. Drs. Bambang Widaryatmo**
NRP. 54060336 Analis Pustabfor Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dir. Reskrim Polda Sulut.
11. **Kombes Pol. Drs. Bamabang Tjahyono**
NRP. 51120122 Kapolwil Kedu Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasda Polda Jatim .
12. **Kombes Pol. Drs. Agus Wantoro Msi**
NRP. 55080486 Pamen Mabes Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolwil Kedu Jateng.
13. **Kombes Pol. Drs. Yusuf Supriyadi**
NRP. 50090159 Waka Polda Lampung diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Jianling Rojianstra Deops Polri.
14. **Kombes Pol. Drs. TB Nunung Mocham-mad Sofjan**
NRP. 50100152 Kabag Binfung Rorenmin Baintelkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka Polda Lampung.

Para Pamen Polri yang dibebaskan dari jabatan lama/dimutasikan dalam jabatan baru adalah :

1. **Kombes Pol. Drs. Tri Heru Wiyono**
NRP. 49010129 Ka PSTK Dit PPITK PTIK diangkat dalam jabatan baru sebagai Ses Puskomplek Div. Telematika Polri.
2. **Kombes Pol. Drs. Nurdin Umar MM**
NRP. 48080228 Kabag Log Set Dediklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Ka. PSTK Dit. PPITK PTIK.
3. **Kombes Pol. Drs. Nana Rukmana**
NRP. 52080085 Widyaiswara Muda Sespim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapusdik Intelkam Lemdiklat Polri.
4. **Kombes Pol. Drs. Agus Salim Bakrie**
NRP. 53040067 Auditor Itwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Binetika/ Set KKE Pus Binprof Div Propam Polri.
5. **Kombes Pol. Drs. Hendrawan Razief**
NRP. 50110138 Auditor Itwasum Popri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Binpam Pus Paminal Div Propam Polri.
6. **AKBP Drs. Desman Sinaga Dipl. Krim**
NRP. 52090083 Waka Subdit Fismondev Dit. Pidter Korserse Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Penyidik Utama Dit. II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.
7. **AKBP Drs. Dwi Priyatno**
NRP. 59110600 Pamen Mabes Polri (diarahkan sebagai LO di Malaysia) diangkat dalam jabatan baru sebagai Analisis Utama Dit. Jianbang Sespim Polri.
8. **AKBP Drs. H. Abdul Ghani Abubakar**
NRP. 54070427 Kasubbag Bisnis Dit. Bintal Desumdaman Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Analis Utama Dit. Jianbang Sespim Polri.
9. **AKBP Drs. Ateng Rustandi Moon**
NRP. 49050226 Kassubag Binprof Ditserse Pidter Korserse Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Penyidik Utama Dit. V/Tipiter Bareskrim Polri.
10. **Kombes. Pol. Wahyu Widiarti SH.**
NRP. 50010160 Ketua Puskoppol Mabes Polri dimutasikan sebagai Pamen Mabes Polri (diarahkan sebagai staf Desumdaman Polri).
11. **AKBP. Sutrisno S. Sos. MM**
NRP. 50070256 Kasubbag Binnis Dit. Bimmas Deops Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Ketua Puskoppol Mabes Polri.

12. **Kombes Pol. Drs. Syamsudin Djafar**
NRP. 50030179 Irbid Jemen Opsnal I Itwil III Itwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Binrohtal Robinjah Desumdaman Polri.
13. **Kombes Pol. Drs. Marshudi Hanafi SH.**
NRP. 50100151 Penyidik Utama Dit III/Kor dan WCC Bareskrim Polri.

No. Pol : Skep/217/IV/2003
Tanggal April 2003

1. **Brigjen Pol. Drs. Yuswar Arsyad**
NRP. 51050131 Waka Polri Sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Staf Ahli Kapolri KRBK dalam rangka pemulihan kesehatan KRRT.
2. **Kombes Pol. Drs. Syahfudin Damanhuri**
NRP. 51050139 Irwasda Polda Sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka Polda Sumsel.
3. **Kombes Pol. Drs. Julius Sriyono MM**
NRP. 51050148 Karo. Pers Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasda Polda Sumsel.
4. **Brigjen Pol. Drs. MD. Primanto SH**
NRP. 49090250 Sekretaris BNN diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Lampung.
5. **Brigjen Pol. Drs. Sugiri SH MSC**
NRP. 49080329 Kapolda Lampung diangkat dalam jabatan baru sebagai Dir III/KOR dan WCC Bareskrim Polri.
6. **Brigjen Pol. Drs. Sadji Aldjairi**
NRP. 48040163 Dir. PPITK PTIK diangkat dalam jabatan baru sebagai Pati Mabes Polri KRBK diarahkan pada jabatan di kementerian kelautan KRRT.
7. **Kombes Pol. Drs. Teuku Syafruddin Guliansyah**
NRP. 49090242 Irwasda Polda NAD diangkat diangkat dalam jabatan baru sebagai Dir. PPITK PTIK.
8. **Brigjen Pol. Drs. Moch. Saudi MSC**
NRP. 49080312 Kapolda DIY diangkat dalam jabatan baru sebagai Staf Ahli Kapolri KRBK dalam rangka pemulihan kesehatan KRRT.
9. **Kombes Pol. Drs. Sudirman**
NRP. 50089(tdk jelas) Waka Polda DIY diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda DIY.
10. **Kombes Pol. Drs. M. Slamet Haryono**
NRP. 48060003 Irwasda Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka Polda DIY.
11. **Kombes Pol. Drs. Samuel Ismoko**
NRP. 48040195 Irwasda Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Dir. II/Ekonomi dan khusus Bareskrim Polri.
12. **Kombes Pol. Drs. Robert Issa Sihaya**
NRP. 49050209 Irbid Jemen Opsnal II Itwil II Itwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasda Polda Metro Jaya.
13. **Kombes Pol. Drs. Rismawan**
NRP. 5360047 Kapolwil Pekalongan Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasda Polda NAD.
14. **Brigjen Pol. Drs. Andi Masmiat**
NRP. 51080169 Dir Jianbang Sespim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Ortala Darenbang Polri.
15. **Brigjen Pol. Drs. Syafriadi**
NRP. 52030100 Karo Ortala Darenbang Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dir. Jianbang Sespim Polri.
16. **Kombes Pol. Dr. Eddy Saparwoko**
SPJP MM NRP. 51110098 Sespudokkes Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapus Litbang dan Informatika BNN.
17. **Irjen Pol. Drs. Demak Lubis**
NRP. 48060004 Kasespim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Pati Mabes Polri KMA diarahkan sebagai Deputi VII Menko Polkam.
18. **Irjen Pol. Drs. Budi Setyawan MSC**
NRP. 49090244 Kapolda Bali diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasespim Polri.
19. **Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika**
NRP. 51060123 Waka Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Bali.
20. **Brigjen Pol. Drs. Suyitno Landung Soedjono SH. MSI.**
NRP. 49110163 Dir II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka Bareskrim Polri.
21. **Brigjen Pol. Drs. Fransiskus Assisi Purwoko**
NRP. 51070138 Kapus Preventif BNN diangkat dalam jabatan baru sebagai Ses. BNN.
22. **Brigjen Pol. Drs. Baroeto Badrus**
NRP. 49060220 Widyaiswara Madya Sespim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapus Preventif BNN.
23. **Kombes Pol. Drs. Bambang Hadiyono , MM**
NRP. 51010148 Wadir Watpers Desumdaman Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri.
24. **Kombes Pol. Drs. Tjiptadi**
NRP. 52120071 Irwasda Polda Jatim diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Bangpers Sdesumdaman Kapolri.
25. **Irjen Pol. Drs. Sudirman Ail , SH. MBA.**
NRP. 48050123 Deops Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Polri.
26. **Irjen Pol. Drs. I Dewa Ketut Gde Astika**
NRP. 48040052 Kapolda Sumut dalam jabatan baru sebagai Deops Kapolri.
27. **Brigjen Pol. Drs. Edy Sunarno**
NRP. 52110029 Waka Polda Metro Jaya dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sumut.
28. **Brigjen Pol. Drs. Nanan Soekarna**
NRP. 55070582 Ses NCB/Interpol dalam jabatan baru sebagai Waka Polda Metro Jaya.
29. **Kombes Pol. Drs. Sisno Adi Winoto MM,**
NRP. 52040107 Dir Bina Mitra Polda Metro Jaya dalam jabatan baru sebagai Ses. NCB/Intepol.
30. **Brigjen Pol. H. Darwan Siregar MSC,**
NRP. 49010115 Dir Karo Bimmas Deops Polri dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri.
31. **Kombes Pol. Drs. Sutarso**
NRP. 50020150 Kabag Bindik Secapa Lemdiklat Polri dalam jabatan baru sebagai Karo Bimas Deops Kapolri.
32. **Kombes Pol. Drs. Pranowo**
NRP. 53010042 Penyidik Utama Bareskrim Polri dalam jabatab baru sebagai Dir. VI/Antiteror Bareskrim Polri. ■